

FAKTOR PENDORONG MELAKUKAN KERJASAMA SISTER PROVINCE JAWA TENGAH - QUEENSLAND (AUSTRALIA) 1991-2009

Oleh :

Sugiarto Pramono

Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang

ABSTRACT

This research aims to know the factors that motivate to do cooperation in the form of sister province between the government of Central Java region (later an it is called as Pemda Jateng) and the subdivision country. Queensland Australia that in Comercial reassen. By using qualitative method, it is found some impeller factors, those are : first, the bad economical condition gives the strong contribution to make sister province cooperation with colleague in foreign country. Second, the wonderful Queensland economic is absolutely interesting for Central Java to make cooperation with the country. The Third, the result got by Central Java from the cooperation is commercial result.

Key Words: *commercial reason; citizen diplomacy; sister city/ province*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan upaya mengungkap faktor pendorong kerjasama *sister province* yang dilakukan Pemda Jateng dengan mitra kerjasamanya di luar negeri, Queensland. Kerjasama antar pemerinah lokal dengan pemerintah lokal di negara lain ataupun mitra bukan pemerintah (*non-state actors*), seperti korporasi internasional (*MNCs*), lembaga swadaya masyarakat internasional atau yang lazim disebut *Internasional non Government Organization (INGO)*, kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan kecenderungan yang muncul, terutama setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok berlin di Jerman (1989)¹.

¹Berakhirnya perang dingin membawa dampak yang luar biasa besar bagi pola hubungan internasional, sedikitnya terdapat dua perubahan mendasar yang terjadi pada hubungan internasional pasca perang dingin, yaitu: Negara yang sebelumnya dianggap sebagai aktor sentral dalam hubungan internasional, kini semakin terkikis peranannya seiring dengan bermunculannya aktor-aktor non Negara (*non-satate actors*). Aneka perusahaan multinasional (*Multinational corporations*), lembaga-lembaga swadaya masyarakat (*non Government Organizations*), beragam kelompok kepentingan bahkan hingga sosok individu kini muncul sebagai aktor-aktor dalam ranah hubungan internasional, sehingga hubungan internasional kini lebih bersifat *multiple chanel*, banyak jalur, dengan tidak melulu melalui jalur negara, namun juga jalur-jalur yang lain. Sedangkan perubahan yang lain adalah munculnya isu-isu yang dulu kerap dikategorikan dalam politik tingkat rendah (*low politics*) seperti energi, lingkungan, Hak Asasi Manusia (HAM), pangan, ekonomi, olah raga menggantikan apa yang dulu sering disebut sebagai politik tingkat tinggi (*hight politics*), perang. Salah satu aktor yang semakin agresif perannya dalam arena hubungan internasional adalah pemerintah lokal (*local government*). Pemerintah-pemerintah lokal dari negara-negara di permukaan planet ini, saling kait mengait,

Pemda Jateng telah melakukan kerjasama tersebut dengan beberapa mitra di luar negeri,, antara lain: Propinsi Fujian (Cina), Propinsi Chungchoeng buk-do (Korea) dan Pemerintah Negara Bagian Queensland (Australia).

MoU siste province Pemda Jateng dengan mitranya Negara Bagian Queensland, Australia, yang menjadi fokus tulisan ini, untuk pertama kali ditandatangani di Brisbane, Queensland pada tanggal 23 September 1991 oleh Gubernur Ismail dan Wayne Goss, Premeir Queensland kala itu. Dirasa cukup memuaskan, setelah lima tahun berjalan, kerjasama yang memang direncanakan akan diperpanjang setiap lima tahun sekali itu diperpanjang untuk pertama kali, setelah setahun masa kerjasama itu habis, yaitu 14 Juni 1997. Periode kedua kerjasama berakhir pada 14 Juli 2002, namun melalui sedikitnya dua kali rapat dengan Komisi A DPRD Provinsi, yakni 12 April dan 12 Juli, akhirnya masa kerjasama periode kedua yang habis disepakati untuk diperpanjang untuk periode ketiga.

Selanjutnya dalam kunjungan sepekan (7-13 September) delegasi Jateng² ke Queensland, *MoU* perpanjangan kerjasama untuk yang kedua kalinya ditandatangani, kali ini oleh Gubernur Mardiyanto dan Premeir Petter Beatti di Gedung Parlemen pada tanggal 10 September 2002. sebagaimana peridode-periode sebelumnya, setelah habis periode ke tiga, pada Desember 2007 *MoU* kembali ditandatangani untuk yang ketiga kalinya.

Penelitian ini menarik karena sedikitnya beberapa alasan, *pertama*: kendati kerjasama *sister province* telah berlangsung lebih dari 18 tahun, namun sulit dipungkiri bahwa kerjasama ini tidak jamak diketahui oleh masyarakat Jateng, sehingga karena kerjasama ini tidak mem”bumi” maka, *kedua*, kontrol dan evaluasi dari masyarakat juga sangat lemah, kalo enggan untuk dikatakan: tidak ada. Lemahnya sosialisai terhadap masyarakat ini pulalah yang menjadi faktor pendorong mengapa partisipasi masyarakat dalam kerjasama sangat kurang, padahal kerjasama dalam bentuk *sister province* sejatinya hanya merupakan payung hukum, bagi aneka kerjasama lainnya yang bersifat teknis seperti ekonomi, investasi, pariwisata, pertanian, pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya yang dapat memberdayakan peran serta masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Commercial Reason dan Citizen diplomacy

Sebagaimana negara, daerah memiliki yang memiliki politik luar negeri /kebijakan luar negeri. Kata “kebijakan” sengaja dipilih untuk menggantikan kata “politik” tidak hanya karena wiliyah politik luar negeri yang bersifat lebih umum dan berprinsip kebijakan satu pintu, namun juga karena kata “kebijakan” lebih tepat untuk mewakili makna yang lebih spesifik dari pada “politik” terlebih untuk Pemerintah Daerah.

Citizen diplomacy sebagai kebijakan luar negeri yang dilakkan Pemerintah Daerah kerap kali dilakukan melalui pertukaran budaya, pertukaran dalam bidang ilmu

berjalan berkelindan berhubungan satu sama lain, sembari melakukan aneka kerjasama di antara mereka.

² Dalam lawatannya ke negeri kangguru ini, selain Gubernur dan instansi terkait, turut pula lima orang anggota dewan dari Komisi A, beserta Ketua DPRD, Mardijo yaitu: A. H. Daromi Irdjas, SH (FPP); KH. Sobri Hadi Wijaya (FPDI-P); Drs. Abdul Manaf (FKB); Drs. Soetikno (FPG); serta Drs. Agus Sentot (FPDI-P), (Suara Merdeka, Rabu 11 September 2002).

pengetahuan atau melalui even-even olah raga internasional (Gelder, M: 2006). Lebih jauh *citizen diplomacy* berimplikasi pada memunculnya hak dan kewajiban pada para pelakunya (*citizen diplomats*) yang biasanya diperankan oleh pelajar, guru, atlet, pebisnis, turis, humanitarians, dan sebagainya. Dalam perannya itu para pelaku diplomasi berupaya melakukan dialog dan pencitraan daerahnya di mata publik internasional (Gelder, M: 2006).

Berbeda dengan Politik Luar Negeri suatu Negara yang dilatar belakangi oleh kepentingan nasional³, maka kebijakan luar negeri Pemerintah Daerah didorong oleh kebutuhan daerah. Potensi daerah yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan daerah memunculkan inisiatif bagi Pemerintah Daerah untuk memberdayakan potensi yang terdapat pada tingkat global dengan melakukan *citizen diplomacy*.

Masih menurut, Henderson, *citizen diplomacy* lazimnya didorong oleh *commercial reason* (sebab ekonomi). Banyak indikator yang dapat ditunjuk sebagai penanda lesunya perekonomian. Selain *Gros Domestic Product* (GDP) rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah juga mewakili kondisi itu. Latar belakang kelesuan ekonomi inilah yang acapkali mendorong daerah untuk melakukan aktivitas internasional (*citizen diplomacy*). Kendati bukan satu-satunya, *commercial reason* diyakini Henderson sebagai faktor dominan yang mendorong kebijakan luar negeri daerah, tak terkecuali *sister province*. Secara lebih operasional hubungan konsep-konsep tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel.1
Hubungan Variable, Konsep Dan Operasionalisasinya

	<i>independent variable</i>	<i>dependent variabel</i>
konsep	<i>commercial reasson</i>	<i>citizen diplomacy</i>
operasionalisasi	lesunya perekonomian Jateng	<i>sister province</i> Jateng-QLD

METODE STUDI

Tulisan ini hakikatnya merupakan upaya untuk mengetahui motif yang mendorong Pemda Jateng mengambil kebijakan kerjasama tersebut. Secara logis, keniscayaan bahwa Pemda Jateng mengambil kebijakakan *sister province* dideduksikan pada teori Henderson yang meyakini bahwa: sebab ekonomi (*commercial reasson*) berkorelasi positif dengan *citizen diplomacy*.

Melalui alur pikir ini, maka dapat ditarik hipotesa bahwa: *kebutuhan perekonomian Jateng menjadi faktor pendorong dominan, bagi Pemda Jateng mengapa mengambil kebijakan kerjasama dalam bentuk ini*. Argumentasi dalam penelitian ini dikonstruksi secara *kualitatif* dengan merujuk pada berbagai sumber relevan. Secara lebih teknis logika ini, dikuatkan dan diperkaya dengan studi dokumenter melalui penelaahan draft *MoU* kerjasama serta surat-surat resmi terkait. Analisis dipertajam lagi melalui

³ Dua pakar hubungan internasional, Jack C. Plano dan Roy Olton, setelah mengamati fenomena politik luar negeri negara-negara, mereka membuat generalisasi, sedikitnya ada lima faktor yang mendorong politik luar negeri suatu negara yang lazim disebut kepentingan nasional, (1) kelangsungan hidup bangsa dan negara; (2) kemerdekaan; (3) keutuhan wilayah; (4) keamanan hingga (5) kesejahteraan ekonomi (Plano, Jack C & Roy Olton: 1999, hal. 127)

library research dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan, serta analisis terhadap media masa seperti koran, majalah serta website terkait.

PEMBAHASAN

Soalnya, bagaimana membuktikan bahwa *sister province* yang dilakukan Pemda Jateng juga terdorong oleh motif ekonomi (*commercial*)?. Untuk menjawab pertanyaan ini sedikitnya ada tiga hal yang harus dibuktikan secara empirik. *Pertama*, apakah perekonomian Queensland, cukup menjanjikan bagi Jateng, sehingga Jateng memilihnya sebagai mitra kerjasama?; *kedua*, apakah perekonomian Jateng mengalami kelesuan sehingga merasa terdorong untuk menjalin kerjasama dengan mitra berprestasi?; dan *ketiga*, apakah hasil kerjasama yang diperoleh Jateng dalam kerjasama ini merupakan perolehan *commercial*, ekonomi atau bukan?.

Jawaban positif pada tiga pertanyaan tersebut, akan menambah daftar data yang semakin melegitimasi teori *commercial reason* Henderson. Uraian dalam pembahasan berikut akan diurutkan sesuai tiga pertanyaan diatas. Kendati demikian ada baiknya—sebelum uraian pembahasan—diketengahkan konteks yang memungkinkan suatu kerjasama dalam bentuk *sister province* muncul.

Dalam memahami kebijakan luar negeri Pemerintah Daerah (*citizen diplomacy*), hemat penulis, selalu ada tiga konteks yang melatar belakanginya, (1) konteks regional dan global (2) konteks domestik; dan (3) konteks lokal.

Pada **tingkat regional** krisis ekonomi Asia (1997) tak pelak memiliki dampak destruktif ekonomi yang luar biasa terhadap negara-negara di Asia tak terkecuali Indonesia. Dampak itu bahkan tidak hanya menghancurkan dimensi perekonomian suatu negara. Di Indonesia (**tingkat domestik**) krisis ekonomi memiliki efek politik yang ditandai dengan munculnya gelombang reformasi yang menghempaskan rezim orde baru. 20 Mei 1998 Suharto, orang terkuat yang menguasai negeri ini selama lebih dari 30 tahun secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Di era reformasi banyak sekali terjadi perubahan di negeri ini, salah satunya—dan yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini—adalah munculnya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU No 25 tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, keduanya kini telah diamandemen dengan munculnya UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004. Dengan munculnya UU tersebut ditambah UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional maka pada **tingkat lokal** (daerah) telah terjadi arah perubahan kebijakan yang cukup mendasar pada Pemerintah Daerah, salah satunya yaitu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang sebelumnya sangat sentralistis dan dimonopoli oleh Pemerintah Pusat, kini di era otonomi Pemda diberi kepercayaan untuk turut serta dalam menentukan nasib daerahnya sendiri melalui kebijakan luar negeri, kendati sebenarnya kerjasama ini sudah berlangsung sejak era 80 an namun kegairahan dalam kerjasama ini muncul terutama setelah otonomi daerah diberlakukan.

Kembali pada masalah dalam tulisan ini, untuk membuktikan betapa kepentingan ekonomi menjadi faktor pendorong utama dalam kerjasama ini, maka sedikitnya akan dibuktikan tiga hal: (1) perkembangan perekonomian Queensland; (2) laju ekonomi Jateng; serta (3) hasil yang diperoleh Jateng dalam kerjasama yang dijalinnya dengan Queensland.

Gairah Perekonomian Queensland

Queensland merupakan salah satu negara bagian Australia yang sangat diminati. Selain potensi alamnya yang menggairahkan Queensland juga unggul dalam teknologi dan menjunjung tinggi profesionalisme, maka tak heran kalau dalam perekonomian, Queensland menjadi negara yang tidak bisa dianggap enteng. Lihat misalnya pada tahun 1990—setahun sebelum *MoU* kerjasama *sister province* Jateng-Queensland, ditandatangani untuk pertama kalinya oleh kedua belah pihak—pertumbuhan ekonomi Queensland sudah mencapai 7,4%, angka tersebut melebihi pertumbuhan nasional ekonomi Australia di kala itu.

Pada tahun yang sama pula seperempat total pertanian Australia berasal dari Queensland, dengan komoditas padi-padian, wool, daging, gula yang telah memberikan sekitar 70% keuntungan pertanian Queensland. Gula, yang menjadi hasil utama Queensland dihasilkan dari daerah lembah subur, Mockay. Eksport gula Australia yang menduduki peringkat ke dua di dunia ternyata berasal dari Queensland. Prestasi Queensland dalam perekonomian tidak cukup berhenti sampai disini saja, namun Queensland juga menyumbang 40% hasil ternak sapi dan anak lembu pada tingkat nasional pada tiap tahunnya, sehingga di bidang pertanian Queensland dijuluki *The Cattle Country* dan *Agricultural Country*. Sapi sebagai ternak unggulan Queensland inilah yang nantinya dalam program *sister province* dengan Jateng menjadi salah satu program andalan dibidang peternakan.

Julukan *The Mining Country* juga ditujukan pada negara bagian ini, karena kandungan bauksit terbesar di dunia, dan umumnya lagi hasil tambang lainnya seperti batu bara, emas, dan seng. Gas alam dan minyak bumi juga telah digali sedangkan yang lain seperti uranium, tin, dan sumber mineral lainnya belum banyak digali dan dimanfaatkan.

Bahkan jauh sebelum itu, sejak dua dekade sebelumnya, yakni pada tahun 1970-1980-an, pertambangan, manufaktur dan pariwisata telah menempatkan Queensland di atas angka rata-rata pertumbuhan nasional Australia. Serta yang lebih menarik lagi, terutama bagi mitra negara bagian ini adalah apa yang diramalkan oleh analis Bis Shapnel (Agustus 1997) bahwa Queensland akan menjadi pelaku ekonomi puncak bangsa tersebut untuk lima tahun berikut, dan negara bagian dengan pertumbuhan yang pesat di Australia sampai 2012. Prospek untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Queensland adalah jauh lebih tinggi dari pada negara bagian lainnya, kata Bis Shapnel (Cown, Alson: 1998, hal. 247).

Selanjutnya, sebuah laporan oleh perusahaan pialang saham Morgans, yang dikeluarkan pada saat yang sama, mengatakan pertumbuhan pekerjaan Queensland akan berlanjut. Kejutan besar dalam laporan Morgans itu adalah kinerja yang kuat dari sektor manufaktur negara bagian itu. Sektor ini telah membangun di atas sumber-sumber alam Queensland, dengan pendapatan utama yang datang dari produk-produk barang, minuman dan tembakau, diikuti oleh produk-produk logam, minyak, batu bara, bahan-bahan kimia dan produk-produk yang terkait, permesinan dan perlengkapan, produk-produk mineral bukan-logam dan produk-produk kayu dan kertas (Cown, Alson: 1998). Melimpahnya hasil pertanian tidak mungkin hanya dikonsumsi warga negaranya sendiri sebagaimana pula mustahil semua kebutuhan warga negaranya dapat dipenuhi oleh hasil-hasil

pertanian domestiknya saja, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali saling bermitra dengan berbagai daerah yang memiliki aneka keunggulannya masing-masing. Perkembangan perekonomian Queensland sangat menggairahkan. Inilah yang kemudian, sangat wajar, jika menjadi faktor pendorong bagi Jateng untuk menjalin bahkan memperpanjang hingga tiga kali kerjasama dengan salah satu negara bagian Australia ini. Lihat tabel 1, berikut:

Tabel. 2

Housing finance (a) for owner occupation, Queensland and Australia, 1997–98 to 2007–08

Region	Financial year										
	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
	— \$m —										
Queensland	8,307	8,924	10,742	11,714	16,838	20,736	26,648	28,499	33,983	39,782	39,032
Australia	54,175	60,897	74,279	74,160	96,750	108,370	127,632	135,013	157,415	174,039	174,507
Queensland as proportion of Australia (%)	15.3	14.7	14.5	15.8	17.4	19.1	20.9	21.1	21.6	22.9	22.4

Excludes alterations and additions. Includes refinancing

Source: Australian Bureau of Statistics, Housing Finance, Australia, Cat. no. 5609.0

(<http://www.detikinet.com/read/2008/05/06/103142/934629/83/pasar-ekspor-jateng-masih-tergantung-as>)

Perekonomian Jateng yang lesu

Krisis ekonomi yang melanda Asia (1997) tak pelak menghempaskan perekonomian nasional, Jateng pun harus menanggung akibatnya. Kendati dalam sepuluh tahun terakhir paska krisis, Bangsa Indonesia telah melaksanakan prosesi pergantian pemimpin nasional berulang kali namun kesulitan ekonomi masih menjadi masalah berarti bagi Bangsa Besar ini .

Dua tabel berikut (tabel 3 & 4) menunjukkan selain angka pertumbuhan yang sangat tidak bergairah dari tahun ke tahun, juga menunjukkan, betapa jika dibandingkan dengan kelima propinsi lain dipulau Jawa, Jateng tidaklah begitu berprestasi, lihat saja misalnya pada tahun 2002, angka pertumbuhan ekonomi Jateng berada pada level paling bawah dibanding lima propinsi lainnya (3, 55%).

Kemudian jika dilihat dari sisi kemampuan pemenuhan kebutuhan daerah, khususnya keuangan daerah, dapat dilihat betapa sangat memprihatinkan. Hasil jajak pendapat dan diskusi panel Kompas (30 November 2000) mengenai otonomi daerah memberikan gambaran yang cukup jelas betapa rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pada tahun anggaran 1997/1998, 51,4% daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah memberikan sumbangan PAD di bawah 15% dari total APBD. Tahun anggaran berikutnya 1998/1999, jumlah daerah yang menyumbang di bawah 15% total APBD meningkat menjadi 65,7%. Bahkan, dalam anggaran 1999/2000, sebanyak 40% daerah kabupaten atau kota hanya menyumbang PAD di bawah 10% total APBD. Hal ini merupakan suatu gambaran yang suram untuk daerah sebesar Jateng. Tak mengherankan jika muncul pesimistis terhadap desentralisasi fiskal yang dinilai masih jauh dari impian.

Padahal dari 4 jenis penerimaan Jateng yang berasal dari, (1) Sisa Lebih Penghitungan Tahun Lalu (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (3) Bagian Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih Tinggi dan (4) Pinjaman Pemerintah Daerah, maka secara teknis Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah yang paling mudah dikelola dan dikembangkan dari pada yang lain.

Buruknya kemampuan pemenuhan kebutuhan daerah juga dapat diketahui dengan melihat Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Jawa Tengah tahun 1998/1999-1999/2000. Nampak betapa ternyata Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Jawa Tengah pada tahun anggaran tersebut ternyata lebih kecil daripada pengeluarannya, sehingga walaupun pada tahun anggaran 1998/1999 penerimaan nampak sedikit lebih besar dari pada pengeluaran, yakni Rp. 636.869.028.000 sedangkan pengeluaran Rp. 635.567.448.000 namun pada tahun anggaran berikutnya 1999/2000, berbalik lebih besar pengeluaran dengan angka Rp. 1.853.524.259.000 daripada penerimaan yang hanya Rp. 886.311.317.000 (Statistik Keuangan Jateng: 2001). ini artinya Jateng mengalami defisit pada tahun anggaran itu.

Data tersebut menggambarkan, betapa perekonomian Jateng sangat lesu. Buruknya perekonomian inilah yang memberi kontribusi bagi terjalannya kerjasama dua mitra ini, Jateng-Queensland. Bagi Jateng dengan latar belakang kondisi perekonomiannya, Queensland nampak memberi harapan yang sangat berarti, sehingga kerjasama yang dimulai di awal dekade 90 an ini sedikitnya telah 3 kali diperpanjang.

Perolehan Bagi Jateng dari kerjasama

Secara ringkas dalam Proposal perpanjangan ke-2 *MoU sister province* Jateng-Queensland yang diajukan oleh Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Pemda Jateng kepada DPRD Provinsi Jateng, tertulis, hasil kerjasama yang diperoleh Jateng dalam kerjasama itu antara lain adalah:

1. Masuknya 16 investor Australia⁴ ke Provinsi Jateng, yang memiliki *multiplier effect*

⁴ 16 investor Australia yang berinvestasi di Jateng tidak bisa menjadi indikator keberhasilan kerjasama *sister province* Jateng-Queensland, bahkan pada perkembangan selanjutnya, nampak betapa bidang investasi kurang begitu memperlihatkan prestasi yang menggembirakan. Subid pengendalian dan pengawasan Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jateng mencatat setidaknya hingga 9 Juni 2008 terdapat 31 perusahaan Australia yang berada di Jateng. Kendati

terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

2. Bantuan beberapa peralatan kesehatan untuk beberapa rumah sakit di Jateng.
3. Adanya pertukaran pelajar dan guru yang berlangsung setiap tahun.

Pada poin (1) terlihat jelas basil yang berupa kepentingan komersial sedangkan pada poin (2) dan (3) kendati yang nampak adalah kepentingan bidang kesehatan dan pendidikan namun pada hakikatnya merupakan kepentingan komersial juga.

Menurut Indah Tri Rohmani(2004) tentang perolehan Jateng dari kerjasama *sister province* Jateng-Queensland sebagai berikut:

a. Industri, Perdagangan dan Investasi

Industri, Perdagangan dan Investasi dalam *MoU*, ketiga ketiga berada dalam dalam satu kategori, karena ketiga bidang tersebut memiliki kaitan cukup erat.

Berikut adalah tabel Proyek PMA dari Queensland tabel 5 dan 6 Daftar Proyek PMA dari Queensland per 1 Jan-30 Des 2001 dan 2002, serta Tabel 7 dan 8 tentang Arus Perdagangan Jateng-Queensland.

Tabel 4
Daftar Proyek PMA dari Queensland, Per 1 Jan-30 Des 2001

No	Nama Proyek	Bidang Usaha	Keterangan
1	PT. Chambra Woodcerving	Perdagangan Ekspert-Import	Join Ina : QL 20 : 80
2	PT. Anggun Sasmita	Jasa Perdagangan Ekspert-Import	100%
3	PT. Gibson Tour and Travel	Biro Perjalanan Wisata	100%
4	PT. Joshua Indo Exsport	Industri Furniture	Join QL : Philipina 50 : 50
5	PT. Satoso Agrindo	Pengolahan Kayu	Join Ina : QL : Inggris 20 .5 : 75
6	PT. Anggun Sasmita	Industri Kimia	100%

(Sumber: Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Tengah dalam Indah Tri Rohani, " Program Sister Province antara Jateng dengan Queensland " (Skripsi), Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004)

Tabel 5
Daftar Proyek PMA dari Queensland, Per 1 Jan-30 Des 2002

No	Nama Proyek	Bidang Usaha	Keterangan
1	PT. Global Alumunium Indonesia	Industri Mineral	100%
2	PT. Chambra Woodcerving	Jasa Perdagangan Ekspert-Import	100%

(Sumber: Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Tengah dalam Indah Tri Rohani, " Program Sister Province antara Jateng dengan Queensland " (Skripsi), Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004)

Pada awal-awal masa kerjasama *Sister Province* hingga tahun 1996 Arus perdagangan dari Jateng ke Queensland memiliki *trend* meningkat dari tahun ke tahun (lihat tabel 4). Trend ini merupakan indikator bahwa kerjasama tersebut memiliki

demikian, ternyata hanya ada 3 perusahaan yang berasal dari Queensland. Kecilnya angka ini menunjukkan betapa kerjasama kurang—kalau enggan untuk dikatakan: tidak—berpengaruh

prospek yang baik di masa depan. Pola naik ini juga merupakan salah satu alasan yang menjadikan kerjasama dalam bentuk *Sister Province* ini kemudian diperpanjang pada tahun 1997, dengan ditandatangani *MoU* Perpanjangan untuk yang pertama kalinya kemudian ditandatangani *MoU* Perpanjangan kedua lima tahun kemudian yakni pada tahun 2002 oleh kedua belah pihak.

Pada perkembangan selanjutnya, nampak betapa bidang investasi kurang begitu memperlihatkan prestasi yang menggembirakan. Subid pengendalian dan pengawasan Badan Penanaman Modal (BPM) Propinsi Jawa Tengah mencatat setidaknya hingga 9 Juni 2008 terdapat 31 perusahaan Australi yang berada di Jateng. Kendati demikian, ternyata hanya ada 3 perusahaan yang berasal dari Queensland (Sururi, Achmad: 2008, hal. 60). Kecilnya angka ini menunjukkan betapa kerjasama kurang—kalau enggan untuk dikatakan: tidak—berpengaruh pada investasi, karena bukan mustahil 3 perusahaan yang berinvestasi di Jateng itu tidak berkaitan sama sekali dengan program-program *sister province*.

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT. Keramco Jawa Tengah. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang berasal dari Queensland yang beralamat di 119 Wynnum Wybnum 4178 Queensland. Perusahaan ini sudah beroperasi di Jawa Tengah sejak 14 September 1999. Dan berdasarkan data dari kantor BPM Jawa Tengah hingga 9 Juni 2008, investasi yang mereka lakukan adalah sebesar Rp. 1.620.000.000.00.

Selanjutnya PT Remco Furniture yang mulai beroperasi di Jawa Tengah sejak 13 Juni 2000. Asal perusahaan ini adalah di 74 Regatta Parade Soutport Queensland 4251. Masih dari sumber yang sama, total investasi yang mereka lakukan adalah sebesar US\$ 200.000 atau sama dengan Rp. 1.880.000.000,00. Serta satu lagi perusahaan asli Queensland yang berinvestasi di Jawa Tengah dan paling besar adalah PT Anggun Sasmita. Perusahaan ini memiliki investasi senilai Rp. 2.063.250.000.00.

Tabel 6
Arus Perdagangan Jateng-Queensland (1990-1996)

Eksport Jateng ke Queensland		
No	Tahun	Jumlah (dalam Juta US)
1	1990	9.361,64
2	1991	9.020,67
3	1992	14.967,79
4	1993	16.712,31
5	1994	21.212,31
6	1995	22.500,00
7	1996	25.731,00

(Sumber: Kantor Wilayah Perdagangan Jawa Tengah dalam Indah Tri Rohani, "Program Sister Province antara Jateng dengan Queensland" (Skripsi), Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004)

a. Pertanian

Penandatanganan *MoU* untuk pertama kalinya (1991), yang dilakukan Gubernur Ismail dengan Premier Wayne Goss pada kunjungan ke Brisbane (Ibu Kota Queensland) bersama anggota DPRD Provinsi Jateng, merupakan perjanjian payung bagi berbagai kerjasama berikutnya antara kedua belah pihak dalam lima tahun kedepan. Dua tahun kemudian yakni pada tahun 1993, berdasarkan *MoU* tersebut untuk pertama kalinya pula penandatanganan *technical agreement* dalam bidang pertanian dilakukan oleh Wakil Gubernur Soesmono dengan Mr. David

Hamill, Menteri perdagangan Queensland.

Dalam perjanjian tersebut telah disepakati, sedikitnya terdapat empat sektor yang termasuk dalam bidang pertanian, yaitu: (1) sektor pertanian pangan; (2) peternakan; (3) perikanan; dan (4) perkebunan. Salah satu tindak lanjut dari *technical agreement* tersebut yaitu didirikannya komisi peternakan pada tahun 1994, dengan melakukan beberapa program yang sebelumnya memang telah direncanakan, seperti perkembangan karantina ternak di Cilacap; pendirian rumah potong hewan di Cilacap untuk sasaran ekspor ke Timur Tengah dan Asia Tenggara; mengupayakan import bibit sapi dari Queensland untuk penggemukan dengan pola PIR di Cilacap; pertukaran dan pelatihan staf dengan Queensland untuk alih ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan.

Kemudian kegiatan lain yang juga telah dilakukan di bidang pertanian yaitu pengiriman staff dari Queensland untuk alih ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu disusul dari Jateng mengirim dua staff peternakan ke Queensland untuk mengetahui lebih lanjut teknik inseminasi buatan dalam pengembangbiakan sapi potong. Bahkan guna kepentingan pengembangan pertanian pernah juga dilakukan penelitian lapangan dan penyusunan *business plan* di Jateng.

Masih dalam paket kerjasama bidang pertanian, pada tahun 1995 Jateng melalui pemerintah pusat telah mendapat bantuan finansial dari Pemerintah Negara Bagian Queensland untuk sektor peternakan.

b. Perhubungan dan Pariwisata

Dalam bidang perhubungan dan pariwisata penandatanganan *technical agreement* belum pernah mereka lakukan, namun demikian berbagai program yang berkaitan dengan kedua bidang ini sudah terealisasi, karena terbawa oleh berbagai program di bidang lain. Beberapa hasil kerjasama yang dapat dikategorikan dalam bidang ini adalah sebagai berikut:

1. Didirikannya komisi perhubungan dan pariwisata yang bertujuan untuk mengembangkan kedua bidang ini khususnya di Cilacap;
2. Pemda Jateng mendapat bantuan dari pemerintahan Queensland guna *Free Feasibility Study* untuk pengembangan daerah Cilacap. Dan yang paling menarik dalam hal ini adalah semua biaya di tanggung oleh pihak Queensland.;
3. Pertukaran antar staff dari kedua belah pihak juga telah dilakukan. Dalam hal ini khususnya dilakukan untuk kepentingan konservasi dan pengembangan agro wisata sadong.

c. Pembangunan Desa dan Kota

Kerjasama *sister province* antara Jateng dan Queensland dalam bidang pembangunan desa dan kota telah dilimpahkan kepada Ibu Kota masing-masing, yakni Semarang dan Brisbane. Pelimpahan inilah yang kemudian berkembang kearah *sister city* di antara keduanya. Penandatanganan *sister city* untuk yang pertama kali telah dilakukn oleh kedua perwakilan Ibu Kota tersebut pada tahun 1993 dan seperti halnya *sister province* keduanya pun telah melakukan evaluasi serta pembaharuan setiap 5 tahunnya

Sister city bermanfaat bagi Pemerintahan Kota Semarang—yang kala itu masih disebut Kodya Dati II--dengan diadakannya kursus singkat bahasa Inggris di lingkungan karyawan Pemda; kunjungan studi banding dalam bidag *tax property*

dari pejabat Dipenda dan KPP PBB kodya Dati II Semarang ke *Revenue Branch of Brisbane*.

Selain itu banyak pula berbagai program dibidang kesenian dan kebudayaan telah terlaksana berkat *Sister City* tersebut, seperti: partisipasi dalam Warana Festival; kursus seni dan budaya bagi anak-anak cacat Kodya Semarang dari para seniman Queensland; serta penyelenggaraan festival bagi anak-anak tersebut.

d. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bidang Pendidikan merupakan salah satu bidang kerjasama yang juga menonjol, terutama program pertukaran pelajar dan Guru yang berlangsung hampir tiap tahun hingga kini. Berbagai program lain yang telah terealisasi adalah pameran pendidikan baik pada tingkat SLTA maupun Perguruan Tinggi; pertukaran staff Dinas; *Sister School* seperti yang telah dilakukan SD Marsudirini dengan *West and Primariwe School Brisbane*, kemudian untuk tingkat Perguruan Tinggi telah dilakukan studi banding dengan saling kunjung antar sekolah dan kuliah kerja praktek antara perguruan tinggi seperti yang telah dilakukan UNDIP dengan *Griffith University* ataupun *Queensland University of Technology*; pelatihan kepala sekolah se Jateng untuk tingkat SLTA tentang manajemen; serta tentang narkoba. Kegiatan pelatihan Kepala sekolah tersebut berlangsung berkat pengiriman bantuan staff dari Queensland. Dalam kegiatan ini semua biaya ditanggung pihak Queensland kecuali biaya penyelenggaraan kegiatan pelatihan itu.

Yang juga menarik ialah dijadikannya bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran bahasa favorit di samping tiga mata pelajaran bahasa lainnya, yaitu Jerman, Cina dan Jepang. Program ini semakin lebih berkembang dengan ditandai dibukanya kelas *inverse*, yakni kelas khusus yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di *Park Ridge High School Queensland* dan program ini merupakan satu-satunya di Australia yang juga mendapat tempat khusus dari siswa dan orang tua murid di sana.

e. Kesehatan

Program yang telah terrealisasi di bidang ini, setidaknya antara lain yaitu: telah dilaksanakannya pengiriman tenaga medis Jateng ke Queensland guna belajar tentang gizi, penanganan *loundry*, penyakit tropis, serta yang paling menarik dari pengiriman tenaga medis tersebut adalah semua pembiayaan ditanggung pihak Queensland. Demikian sebaliknya, dari pihak Queensland pun mengirim 3 ahli gizi dan perawatnya ke Jateng. Hanya saja bedanya kedatangan 3 staff tersebut tidak untuk belajar namun dimaksudkan guna membantu staff kesehatan Jateng. Seperti halnya sebelumnya pembiayaanpun tetap ditanggung pihak Queensland.

Bukan hanya melibatkan 2 pihak, pihak ketiga juga mulai dikaitkan, yakni dengan *World Bank*. Bahkan dengan lembaga keuangan dunia ini, Jateng dan Queensland memperoleh bantuan yang berkesinambungan guna penanganan kontrak lembaga tersebut untuk pelatihan ulang 100 perawat Jateng senilai 7,5 juta dollar Australia.

Nampaknya, jawaban dari ketiga pertanyaan pengantar dimuka, menggiring kita pada keyakinan bahwa *commercial reason* menjadi faktor dominan, jika bukan satu-satunya, yang mendorong Jateng melakukan kerjasama *sister province*.

SIMPULAN

Ada tiga fakta penting, yang menunjukkan betapa faktor ekonomi menjadi faktor pendorong dominan—kalau bukan satu-satunya—yang bisa ditangkap hingga uraian ini; (1) bahwa perkembangan perekonomian Queensland memiliki *trend* membaik, (lihat table 1); (2) ada kelesuan pertumbuhan perekonomian Jateng (lihat tabel 3 & 4) dan (3) hasil yang diperoleh Jateng dalam kerjasama tersebut, merupakan hasil yang bersifat komersial, lihat misalnya daftar proyek PMA dari Queensland (tabel 6 dan 7). Ini artinya bahwa apa yang digeneralisasikan Henderson, *commercial reasson* menjadi faktor pendorong *citizen diplomacy* yang dalam kasus ini berbentuk kerjasama *sister province*, sekali lagi memperoleh pembenaran secara empiris.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Hingga tahun 2004 terdapat sedikitnya 11.000 kerjasama dalam bentuk *sister city/ province* dari 1200 pemerintah lokal dari 125 negara di dunia (<http://www.international.relation.com/wbadvir/cities.htm>) Sedangkan pada level nasional, di Indonesia Deplu mencatat hingga tahun 2003 terdapat 75 kerjasama *sister city/ province* (Haryono, Endi: 2003, hal. 10). Kemudian pada tahun 2004 Usmar Salam, peneliti *sister province* dari UGM mencatat sedikitnya terdapat 100 kerjasama dalam bentuk yang sama (Salam, Usmar: 2004, hal. 4).

Kendati di Indonesia kerjasama ini memperoleh respon positif terutama dari kalangan para pejabat di pemerintah daerah, namun sayangnya hal itu baru sebatas pada kuantitas semata. Lihat saja misalnya, masih menurut Usmar Salam, hingga setidaknya tahun 2004, tidak lebih dari 15% kerjasama dalam bentuk ini yang berjalan dengan baik, kurang dari 20% berjalan dengan apa adanya, sedangkan sisahnya 65% hanya menjadi perjanjian tidur, sehingga tak ayal, bahwa peran aktif masyarakat daerah dalam mengawasi serta turut terlibat aktivitas kerjasama ini mutlak diperlukan, namun impian ini tinggalah impian jika kerjasama ini tidak pernah diketahui oleh masyarakat umum, maka tidak dapat ditawarkan, sosialisasi kerjasama kepada masyarakat juga mutlak diperlukan, semutlak dibutuhkannya kontrol serta partisipasi mereka terhadap kerjasama ini.

Beberapa pertanyaan yang patut direnungkan para akademisi yang membidangi adalah: apakah kerjasama *sister province* Jawa Tengah-Queensland sudah efektif? Jika tidak, mengapa terus diperpanjang? siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini, masyarakatkah, para pengusahakah atau malah para pejabat? Rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah?

DAFTAR PUSTAKA

- Cown, Alson (Editor). 1998. *Australia lan of Achievement: Negeri Yang Penuh Prestasi*. t.t. Jaqui lane.
- Gelder, M. 2006. *Meeting the Enemy, Becoming a Friend*, Bauu Press, Boulder, Colo. dalam wikipedia.org
- Haryono, Endi. 2003. *Pengajaran Studi HI di Era Otda*. (Makalah Seminar dipresentasikan pada Pertemuan Pertama Forum Komunikasi Jurusan Hubungan Internasional Indonesia (FKJHII) di Yogyakarta 13-15 Oktober).
- Henderson, Conway W. 1998. *International Relation: Conflict and Cooperation at the Turn of the 21st Century*. Carolina: Mc. Graw Hill

- Indah Tri rohmani. 2004. *Program Sister Province Antara Jateng dengan Queensland* (Skripsi tidak dipublikasikan). JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
- J. Prihatmoko, Joko dkk. 2001. *Identifikasi Konflik dan Potensi Konflik Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah*. (laporan Penelitian tidak dipublikasikan). Biro otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dan Lambaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Plano, Jack. C. dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. t.t. Putra A. bardin.
- Sururi, Achmad. 2008. *Perjanjian Kerja Sama Sister Province Jawa Tengah-Queensland: Studi Evaluasi tentang Efektivitas dan Kepentingan Aktor di Jawa Tengah* (TESIS tidak dipublikasikan) KONSENTRASI HUBUNGAN INTERNASIONAL, SEKOLAH PASCASARJANA. UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
- Salam, Usmar. 2004. *Dinamika Kerjasama Internasional Propensi di Indonesia dengan di Luar Negeri*. (Makalah dipresentasikan pada Lokakarya Cara Penanganan Kerjasama Internasional, Hotel Inna Garuda, 26-27 Juli)
- Suara Merdeka, Rabu 11 September 2002
- Sister cities and inter-city organization, <http://www.internationalrelation.com/wbadvir/cities.htm>.
- <http://www.detikinet.com/read/2008/05/06/103142/934629/83/pasar-ekspor-jateng-masih-tergantung-as>